



# MIMIKA

## MEMBANGUN

*Eme Neme Yauware*



## Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, Media Bappeda ini kami hadirkan sebagai implementasi dari tanggungjawab kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, serta mental spiritual, secara bersamaan dan sinergis, dengan melibatkan semua unsur dalam pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Media ini adalah dokumentasi atas sebagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami persembahkan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi atas kiprah pemerintah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas Media ini dan bagi kemajuan pembangunan di Mimika.

Tim Redaksi

### Pengarah

Bupati Mimika

### Penanggungjawab

Kepala Bappeda

### Tim Redaksi Koordinator

Sekretaris Bappeda Mimika

### Anggota :

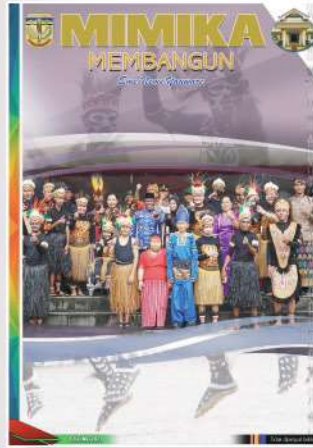
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Pengendalian

Kantor Bappeda Kabupaten Mimika  
Jl. Cendrawasih SP.II, Utikini Baru,  
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. 99963



# Mimika Membangun Edisi Mei

## Daftar Isi

- Laporan Utama Hal. 3-7
- Laporan Khusus Hal. 8-19
- Bidang Infrastruktur Hal. 20-22
- Bidang Sosial Budaya Hal. 23-37
- Bidang Ekonomi Hal. 38-45
- Galeri Foto Hal. 46-47





# WTP Delapan Kali Berturut-turut

**H**ASIL pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, Pemkab Mimika kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).



Kantor Pusat Pemerintahan  
Kabupaten Mimika

Foto: Bappeda

Penjabat Sekda Mimika, Petrus Yumte mengatakan ini merupakan kali kedelapan Pemkab Mimika meraih opini WTP atas LKPD Mimika dari BPK RI. Hanya saja Pemkab Mimika belum menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) karena seyogyanya langsung diserahkan ke Bupati.

Sementara kata Pj Sekda, Plt Bupati masih berhalangan untuk hadir dalam penyerahan LHP pada Selasa pekan lalu di Jayapura. "Dokumen harus diserahkan langsung ke Bupati. Tapi sudah diumumkan di Jayapura dan Mimika masih pertahankan status WTP,"





kata Pj Sekda ketika ditemui Senin (22/5/2023) di Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, SP 3.

Menurut Pj Sekda, pencapaian ini bisa diraih karena adanya kerja keras dari semua perangkat daerah. Sehingga laporan keuangan bisa disampaikan tepat waktu ke BPK. Juga OPD bisa kooperatif dalam membantu BPK melakukan audit termasuk turun ke lapangan menunjukkan pekerjaan yang menjadi sampel pemeriksaan.

Meski meraih WTP, Pj Sekda mengakui opini ini bukan serta mer-ta menyatakan Pemkab Mimika bersih. Sebab WTP adalah terkait





laporan keuangan pemerintah daerah yang bisa memenuhi standar akuntansi pemerintah.

Dalam LHP juga tentunya masih ada catatan atau rekomendasi dari BPK kepada Pemkab yang harus ditindaklanjuti. Termasuk pengembalian jika ada kerugian negara yang ditimbulkan. “WTP bukan berarti tidak ada masalah, ada rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti. WTP itu artinya penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Tidak berarti bahwa Pemkab Mimika lolos, ada rekomendasi BPK yang harus kami tindaklanjuti,” jelas Pj Sekda. (BAPPEDA)



**Situasi kota Timika**

Foto: Bappeda



**WTP bukan berarti tidak ada masalah, ada rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti. WTP itu artinya penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Tidak berarti bahwa Pemkab Mimika lolos, ada rekomendasi BPK yang harus kami tindaklanjuti,"**



# Peringatan Hari Pendidikan Nasional

**D**ALAM rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan menggelar upacara yang dipusatkan di Kantor Pusat Pemerintahan pada Selasa (2/5/2023).

Upacara yang dipimpin oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte, SH MSi ini juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah XXVII. Dihadiri Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan, Willem Naa serta jajaran, ASN dan honorer Pemkab Mimika, guru dan peserta didik dari SD, SLB,



**Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte, SH MSi bersama siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) pada Hari Pendidikan Nasional.**

Foto: Bappeda





SMP, SMA dan SMK. Usai upacara, para siswa dari beberapa sekolah tampil membawakan tarian 'Pelajar Pancasila' yang dipadukan dengan tarian Papua, drumband dan padu-

an suara.

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte menyatakan sejalan dengan kebijakan nasional yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Nadiem

Makarim maka di Pemkab Mimika juga telah mengimplementasikan Merdeka Belajar yang mendorong para guru lebih mandiri dan peserta didik yang berkualitas.



Foto: Bappeda



Pemkab Mimika kata Pj Sekda, sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas kehidupan guru. Itu dilakukan karena guru merupakan benteng utama dalam kemajuan pendidikan. "Kami diskusi dengan Dinas Pendidikan, saya sampaikan perhatikan kesejahteraan guru, misalnya gaji dibayar tepat waktu, TPP harus dibayar tepat waktu, hak-hak lain yang masih bisa kita perhatikan supaya mereka nyaman. Kalau mereka nyaman tugas pasti jalan dengan baik," katanya.

Hal lain yang juga ditekankan Pemkab Mimika sesuai arahan Plt Bupati adalah tidak ada lagi diskriminasi atau perbedaan terhadap sekolah swasta dan negeri. Sebab lembaga non pemerintah juga berperan dalam kemajuan pendidikan sehingga harus



mendapat porsi yang sama.

Mengenai kebijakan penganggaran, mengingat pendidikan adalah urusan wajib maka Pemkab Mimika telah berupaya mengalokasikan anggaran sesuai porsi keuangan daerah yang difokuskan untuk kesejahteraan para guru.

Di momen Hardiknas ini, ada pula 97 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) SMA dan SMK di Mimika yang sejak Januari belum menerima gaji. Terkait hal tersebut, Pj Sekda didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan, Frans Bokeyau menyatakan

Pemkab Mimika siap membayar.

Hanya saja ditambahkan Frans Bokeyau, status guru PPPK SMA dan SMK ini belum dilimpahkan dari Pemprov Papua ke Pemkab Mimika sehingga status kepegawaiannya masih di Pemprov Papua. "Apabila dalam waktu dekat ada maka akan keluar surat edaran Gubernur provinsi papua untuk melimpahkan mereka ke kabupaten. Statusnya masih di Provinsi Papua. Terkait hak-hak, kami sudah siapkan kami hanya tunggu surat edaran sebagai dasar pembayaran," tandasnya. (BAPPEDA)





# KPK RI Monitoring di Kabupaten Mimika

**S**EHUBUNGAN dengan pelaksanaan Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi periode Tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) difasilitasi oleh

Inspektorat Kabupaten Mimika, melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di wilayah Provinsi Papua Tengah, pada Kamis (25/05/2023) di Timika.

Hadir dalam rapat ini, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Petrus Yumte bersama Kepala Satuan Tugas V Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Nurul Ichsan Al-Huda,





Inspektur Pemkab Mimika, Sihol Parningotan dan Perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika.

Kepala Satuan Tugas V Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Nurul Ichsan Al-Huda menyampaikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan amanat UU nomor 19/ 2019 tentang KPK dengan tugas koordinasi dan supervisi. "Kami melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui upaya- upaya pencegahan. Mudah-mudahan rapat ini dapat membawa manfaat yang kita harapkan," ujarnya.

Nurul Ichsan mengingatkan bahwa korupsi itu merupakan kerugian keuangan negara. "Demikian pula suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang terkait dengan korupsi," tuturnya.

Ia menambahkan, jika dilihat fenomena korupsi, terjadi pada semua partai politik, semua daerah, dan semua kelompok umur. Sehingga dalam upaya mengurangi korupsi, KPK melakukan upaya- upaya pencegahan dengan berbagai

pendekatan, salah satunya adalah Monitoring Center for Prevention (MCP).

Ada delapan area yang di intervensi oleh tim pencegahan, yaitu, pengadaan barang dan jasa, tata keuangan desa, perizinan, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Disebutkan, total capaian MCP



Foto bersama Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte dengan perwakilan KPK RI dan pihak terkait dalam rapat dengan pendapat terkait monitoring pelaksanaan MCP KPK.

Foto: Bappeda



Kabupaten Mimika sebesar 33,03 dan berada di peringkat keempat di Provinsi Papua Tengah. Nilai ini berdasarkan penilaian dari delapan area intervensi. Sementara urutan paling tinggi di Provinsi Papua Tengah adalah Kabupaten Intan Jaya dengan poin 36,65.

Menurut Nurul Ihsan, banyak peluang dari Kabupaten Mimika yang harus ditingkatkan karena dari sisi ketersediaan infrastruktur, fasilitas, dan pendapatan daerah. "Itulah sebabnya alasan kami ke sini, untuk mendorong agar MCP ini bisa ditingkatkan di Kabupaten Mimika," ujarnya.

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte mengatakan pada 4 Agustus 2022, melalui pendampingan KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, tim Supervisi KPK, bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, didampingi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksa-

an Negeri Mimika, telah melakukan pemasangan papan nama di atas aset Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Aset terdiri atas tanah dan bangunan. Juga pemasangan papan pemberitahuan di atas tanah yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta tempat usaha, baik hotel maupun restoran, yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya, telah kita pasang stiker," tegas Pj Sekda.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan

komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan KPK, serta instansi vertikal lainnya, dalam rangka tertibnya manajemen aset daerah, dan peningkatan pendapatan daerah.

Saat itu dibahas juga permasalahan aset tanah pelabuhan Poutmako dan hasilnya, pada 6 Februari 2023, tanah Pelabuhan Poutmako seluas 11,57 hektar berhasil disertifikasi atas nama Pemkab Mimika nomor register 00001/SKHP/BPN-26.11/11/2023.(BAPPEDA)



Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte bersama perwakilan KPKRI dan pihak terkait dalam rapat dengar pendapat terkait monitoring pelaksanaan MCP KPK.

Foto: Bappeda

# Wujudkan *Smart Government* Pemkab Mimika Bakal Terapkan Tanda Tangan Elektronik

**S**EJALAN dengan reformasi birokrasi yang mengamanatkan perlunya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien maka Pemerintah Kabupaten Mimika mulai memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital dalam birokrasi. Sekaligus sebagai implementasi dari smart government sebagai bagian dari smart city.

Selain beberapa layanan pemerintahan yang sudah berbasis digital, Pemkab Mimika juga bakal mulai

menggunakan tanda tangan elektronik dalam hal administrasi. Sebagai langkah awal, Pemkab Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Balai Sertifikat Elektronik memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan digelar Selasa (16/5/2023) di Hotel Cenderawasih 66 Timika.

Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten mengatakan pe-

manfaat sertifikat elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan privasi, dimana nantinya seluruh tanda tangan akan ditandatangani secara elektronik. Hal ini untuk memudahkan proses percepatan layanan administrasi.

Selain itu, sertifikat elektronik juga bermanfaat secara efisiensi dan praktis dalam penggunaannya serta terjamin dan dilindungi kerahasiaannya. Disamping juga, hemat biaya dan tentunya mengurangi penggunaan



Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten (dua dari kiri) memukul tifa tanda pembukaan kegiatan sosialisasi dan bimtek penerapan sertifikat elektronik.

Foto: Bappeda



kertas (eco-friendly).

Untuk itu dikatakan Petrus, dengan perkembangan era saat ini, kualitas layanan pemerintahan juga perlu secara terus menerus ditingkatkan, sehingga pada akhirnya nanti, akan berpengaruh pada peningkatan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat. OPD juga dapat meningkatkan prestasi dan kinerja karena dalam implementasinya penerapan

tanda tangan elektronik dapat memperpendek birokrasi dan mampu meningkatkan citra positif terkait prosedur pelayanan dalam pemerintahan yang baik, berlangsung secara lebih cepat, efektif dan efisien.

Dengan menerapkan sertifikat elektronik maka instansi mampu mewujudkan efisiensi di berbagai layanan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah pejabat pemerintah pada in-

stansi terkait dapat memberikan persetujuan dan validasi melalui tanda tangan elektronik tanpa terbatas ruang dan waktu. "Jadi pimpinan OPD mau dimanapun bisa tanda tangan tanpa harus bertemu langsung dengan staf," ujarnya.

Dengan demikian dikatakan Petrus, akan ada penyederhanaan alur proses bisnis dan efisiensi karena pejabat dapat memberikan persetujuan







melalui tanda tangan elektronik dari mana saja. Tidak hanya itu, manfaat dari penerapan sertifikat elektronik juga mampu menekan anggaran yang dikeluarkan oleh instansi. Serta tentunya dapat mendukung green office karena tidak perlu menghabiskan kertas.

Penerapan ini didukung oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sebagai instansi penyelenggara sertifikat elek-

tronik di Indonesia yang merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Siber Dan Sandi Negara (bssn) untuk melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi elektronik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang dimaksud meliputi penerbitan, pembaruan, pencabutan, serta pengelolaan sistem sertifikasi elektronik.

Penerapan sertifikat elektronik ini antara lain untuk tanda tangan elektronik yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. "Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sama dengan tanda tangan manual," tegas Petrus. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Usulan Pemkab Mimika di Musrenbang Provinsi Papua Tengah

**P**EMERINTAH Provinsi Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) di Nabire pada Rabu (3/5). Pemerintah Kabupaten Mimika juga turut serta yang diwakili empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perikanan serta Diskominfo.

Musrenbang RKPD tingkat provinsi ini jadi ajang bagi Pemkab Mimika untuk mengusulkan sejumlah program pembangunan untuk dikerjakan secara kolaborasi dengan Pemprov Papua Tengah. Usulan ini disampaikan melalui sistem perencanaan Provinsi Papua Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Ir Yohana Paliling, MSI mengatakan ada beberapa OPD mengusulkan program kegiatan seperti Dinas Perhubungan untuk pembangunan dermaga pelabuhan rakyat serta peningkatan area Pelabuhan Pomako.

Dari Dinas PUPR mengusulkan pembangunan Jalan SP 5 – Kaugapu dan jembatan di irigasi. Dinas Perikanan mengusulkan program terkait perikanan tangkap. “Kita punya harapan agar mendapatkan anggaran dari pusat. Inilah yang kita siapkan administrasinya apakah tanahnya atau hal lain yang perlu disiapkan untuk mengambil peluang itu, karena dari 8 kabupaten di PPT, hanya Mimika dan Nabire yang punya pantai,” ungkapnya.

Dinas Pendidikan juga mengusulkan program terkait Sekolah Luar Biasa (SLB). Dinas Pertanian terkait pengawasan mutu penyediaan dan peredaran benih. Dari Dinas Peternakan



Musrenbang Provinsi



Foto: Bappeda

mengusulkan pengembangan dan pelatihan khusus paramedis, pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak.

Bappeda Mimika juga menyuaran agar dengan adanya Daerah Otonom Baru (DOB) ini memberi peluang lebih besar bagi daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran terutama yang berhubungan dengan pantai dan laut. Seperti pembangunan sarana prasarana

dergama.

Usulan di Musrenbang Provinsi ini akan terus dibawa sampai ke pemerintah pusat pada Musrenbang Nasional. “Jadi, kalau yang dari pengajuan di Provinsi Papua Tengah terakomodir pasti estimasi anggarannya bertambah. Karena usulan yang ini kemarin kita tidak masukkan di sini tapi baru di masukkan di PPT kemarin,” terangnya. (BAPPEDA)

# Program Quick Wins Presisi Polri Hadir Untuk Masyarakat di Mimika

**UNTUK** meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri maka kini Polri hadir, dengan program Quick Wins Presisi Polri pada aplikasi Polri Super App.

Wakapolres Mimika, Kopol Hermanto, SH SIK MH menjelaskan program quick wins Polri presisi ini agar, masyarakat termasuk di Kabupaten Mimika bisa memberikan usul, saran dan masukan teradap pelayanan serta kinerja institusi Polri khususnya di Polres Mimika melalui aplikasi tersebut.

"Ini untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Program ini berlaku di seluruh Indonesia,"kata Wakapolres yang ditemui, di kantor Pelayanan Polres Mimika, Selasa

(23/5/2023).

Kata Kopol Hermanto bahwa program aplikasi super app Polri ini, bisa diakses dengan menggunakan handphone android dengan cara mendownload di Play Store.

Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan secara langsung dengan mendatangi kantor Polres, Polsek bahkan Pospol yang ada di wilayah hukum Polres Mimika. "Jadi tidak semua keluhan disampaikan melalui aplikasi. Warga bisa mendatangi kantor polisi terdekat, atau pada kesempatan lain yaitu program jumat churat yang sudah berlangsung,"ucap Wakapolres.

Ia menjelaskan bahwa untuk program tersebut, di jalankan oleh semua fungsi

yang ada di lingkup Polres Mimika. "Jadi setiap fungsi di kepolisian harus laksanakan program ini, seperti polisi RW, Bhabinkamtibmas, Sentra Pelayanan Kepolisian. Kemudian dalam pengurusan SKCK harus cepat, pelayanan SIM, dan STNK,"jelas Kopol Hermanto.

Lebih lanjut kata Wakapolres bahwa untuk di Mimika sendiri, pengenalan program super app ini akan di sosialisasi ke masyarakat melalui Bhabinkamtibmas maupun setiap personel Polres Mimika. "Kalau sosialisasi pasti kita laksanakan melalui Bhabinkamtibmas maupun anggota polisi yang sudah pahami aplikasi itu,"papar Kopol Hermanto.(BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Tiga Lapangan Terbang Dibangun

**S**EBAGIAN besar distrik dan kampung di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika hanya bisa diakses menggunakan pesawat terbang berukuran kecil seperti pesawat jenis Pilatus maupun helikopter yang kapasitasnya sangat terbatas.

Kondisi ini berdampak pada sulitnya mobilisasi masyarakat. Terlebih angkutan barang kebutuhan masyarakat. Kapasitas terbatas dan mahalnya biaya transportasi menyebabkan harga barang juga menjadi mahal.

Menjawab kebutuhan itu, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah menyiapkan anggaran senilai Rp27 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

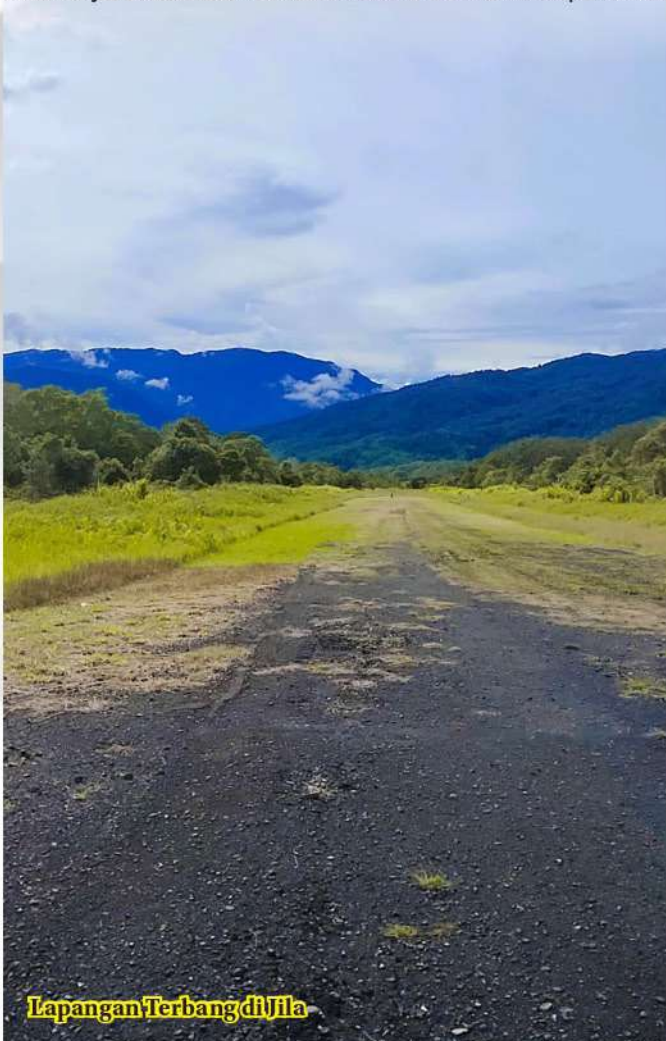
Ada tiga distrik yang menjadi lokasi pembangunan lapangan terbang di tahun ini. Yakni Jila, Hoeya dan Noema. Sebagian besar adalah pekerjaan lanjutan karena sebelumnya sudah dilakukan namun dalam beberapa tahun

terakhir terhenti dan akan dilanjutkan di Tahun 2023.

Proses pembangunan tiga lapangan terbang ini diawali dengan persiapan dokumen pelelangan. Pelelangan dilakukan secara terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Mekanisme pelelangan ini sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan Pemkab Mimika dalam pengadaan barang dan jasa. "Jadi kalau administrasinya lengkap, pihak ketiga silakan ikut tender," jelasnya.

Pembangunan tiga lapangan terbang ditarget selesai Tahun 2024 mendatang. Terutama di Hoeya yang memang sangat membutuhkan sementara pembangunan sudah terhenti sejak Tahun 2017. "Kami upayakan agar pembangunan akan berlanjut terus sampai tahun depan. Target kami tahun depan pesawat sudah bisa landing," jelasnya.

Ini merupakan komitmen dari Pemkab Mimika untuk melayani masyarakat yang berada di wilayah pegunungan dan hanya bergantung pada transportasi udara. "Masyarakat gunung ini kan tidak ada akses lain. Kereta tidak ada, mobil juga tidak ada, jalan kaki pun tidak bisa, biasanya cuma pakai pesawat. Jadi, kalau kita bilang mau melayani masyarakat, tentu kita harus selesaikan lapangan-lapangan ini, karena yang punya negeri ini mereka semua yang ada di gunung dan pesisir," ungkapnya. **(BAPPEDA)**



Lapangan Terbang di Jila



Foto: Bappeda

# Kemenhub Sosialisasi Penerapan Inaportnet di Pelabuhan Pomako

**K**EMENTERIAN Perhubungan Republik Indonesia melalui Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, melaksanakan sosialisasi dan pendampingan uji coba penerapan Inaportnet bagi jasa pengurusan transportasi laut dan agen pelayaran yang ada di wilayah kerja Unit Penyelenggara Perhubungan (UPP) Pomako di Hotel Horison Diana, Timika pada Rabu (17/5/2023).

Sub Koordinator Sistem Informasi Angkutan Laut dan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Ayu Kharizsa menjelaskan inaportnet, merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elek-

tronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal, dan barang dari seluruh instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan.

Lebih lanjut ia menguraikan bahwa, inaportnet memang merupakan layanan digital tersentral di bawah pengelolaan Direktorat lalu lintas angkutan laut. Dimana aplikasi ini dapat diakses oleh para pemangku kepentingan di pelabuhan, baik agen pelayaran, perusahaan bongkar muat, JPT dan jasa angkutan terkait di pelabuhan.

"Kita sudah berkolaborasi dengan

beberapa aplikasi kelembagaan lain, seperti pembayaran PMBP. Dan juga berkolaborasi dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan," jelas Ayu.

Lebih lanjut kata Ayu, tujuan dari inaportnet itu yakni untuk memudahkan para pengguna jasa dipelabuhan, seperti pelayanan untuk transparansi, dan mengurangi tatap muka antara regulator dan pengguna jasa sehingga bisa menghindari hal-hal tidak diinginkan.

Untuk penerapan inaportnet sendiri, kata Ayu akan di berlakukan pada Bulan Juni mendatang di Pelabuhan Pomako. "Kalau untuk aplikasinya sendiri sudah di implementasikan sejak



Pelabuhan Pomako  
Foto: Bappeda

Tahun 2016 lalu, dan sudah berlaku di sejumlah pelabuhan yang ada di Indonesia," sambungnya.

Sementara itu, Kepala UPP Pomako, Husni Anwar Tianotak dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa pihaknya telah siap untuk penerapan inaportnet di UPP Pomako. "Selama ini kita masih tatap muka maka dengan hadirnya inaportnet ini, pelayanan itu melalui aplikasi," ucapnya.

Kata Husni bahwa dalam penerapan aplikasi inaportnet tersebut, perusahaan pelayaran sendiri yang akan mengupload dokumen-dokumen dan sehingga apabila belum lengkap, maka belum bisa diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). "Jadi pengguna jasa itu sendiri harus lebih aktif, untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan da-

lam inaportnet agar bisa cepat terbit SPB," kata Kepala UPP Pomako.

Bahkan kata dia, pihaknya telah siap untuk mengoperasikan sistem inaportnet di UPP Pomako. "Secara keseluruhan mulai jaringan internet, dan operator kami sudah siap," papar Husni.

## **Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Pomako Capai 1000 Kontainer Per Bulan**

Tiga perusahaan pelayaran melayani angkutan kontainer melalui Pelabuhan Pomako. Tiga perusahaan tersebut yakni PT SPIL, TANTO dan TEMAS.

Dalam melakukan bongkar muat barang, perusahaan pelayaran menggunakan sistem titip kontainer karena kapal harus melanjutkan pelayaran ke daerah selanjutnya seperti Asmat dan Merauke. "Nanti jika kapal balik dari Merauke maka perusahaan pelayaran akan memuat kembali kontainernya dan dibawa ke Surabaya lagi," katanya.

Penitipan kontainer ini memberikan pemasukan bagi negara yang dibayarkan langsung oleh perusahaan ke Kementerian Keuangan. UPP Kelas II Pomako hanya menerbitkan billing dan diserahkan ke perusahaan.

UPP mencatat setiap bulan ada 900 sampai 1000 kontainer yang bongkar muat di Pelabuhan Pomako. Kontainer ini dititipkan sekitar lima hari. **(BAPPE-DA)**



**Pelabuhan Pomako**

Foto: Bappeda

# Revitalisasi Bahasa Kamoro

## Balai Bahasa Berikan Pelatihan Bagi 30 Guru

**D**ALAM rangka implementasi perlindungan bahasa daerah, yakni bahasa Kamoro di kabupaten Mimika, Balai Bahasa Provinsi Papua menggelar pelatihan bagi 30 orang guru utama di SMA YPPK Tiga Raja pada Selasa (9/5).

Kegiatan tersebut dibuka Paulus Dumais, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika dan dihadiri Sukardi, Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, Iwan Anwar, Anggota DPRD Mimika serta Willem Naa, Plt Kepala Dinas Pendidikan.

Sukardi, Kepala Balai Bahasa Prov-

insi Papua Gau mengatakan, kegiatan dilaksanakan dalam rangka implementasi perlindungan bahasa daerah di Kabupaten Mimika.

Dikatakan, bahasa daerah sangat penting dilaksanakan karena 60 sampai 70 persen bahasa daerah ada di Papua. "Jadi, kalau hutan itu gundul atau rusak bisa tumbuh lagi, tetapi kalau bahasa daerah yang hilang maka perlu ribuan tahun baru ada bahasa baru," katanya.

Ia menjelaskan, perlindungan bahasa atau revitalisasi bahasa daerah merupakan lanjutan dan wujud dari program merdeka belajar episode 17 yang dilun-

curkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud, Ristek)

"Dan ini merupakan sejarah baru bagi kami, karena dulu soal bahasa daerah ini tidak tersentuh. Jadi, mengapa urusan bahasa daerah ini penting dan spesifik, di Indonesia ini jumlah bahasa daerah, di catatan Badan Bahasa ada 718 bahasa daerah, sebagian besar ada di Papua," ungkapnya.

Lanjutnya, di Papua terdapat 428 bahasa daerah atau lebih dari setengah bahasa daerah di Indonesia ada di Papua, sehingga revitalisasi bahasa



**TABUH TIFA - Paulus Dumais, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika didampingi Sukardi, Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua serta lainnya saat menabuh Tifa, tanda dimulainya kegiatan revitalisasi, Selasa (9/5)**

sangat penting dilakukan.

Persoalan tentang bahasa juga diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 yang disalah satu pasalnya menyebutkan urusan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa daerah adalah tanggungjawab pemerintah daerah.

“Jadi jelas yang punya tanggungjawab terhadap bahasa daerah adalah pemerintah daerah, kalau kami dari balai bahasa itu mengurus bahasa negara, atau bahasa Indonesia, yang kita lakukan saat ini adalah memfasilitas pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pelestarian bahasa daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, cara melestarikan bahasa daerah adalah melakukan model pembelajaran bahasa daerah, diikuti peraturan yang mewajibkan terkait dengan hal tersebut. “Identitas Papua ini yang paling nyata sekali adalah bahasa daerah, inilah yang harus kita jaga,” katanya.

Ia juga menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan bukan bentuk menganak tirikan bahasa dengan memilih bahasa Kamoro, namun kegiatan hanya bentuk model atau percontohan agar nantinya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan bahasa daerah suku lain di Mimika.

Sementara itu, Iwan Anwar, Ketua Bapemperda DPRD Mimika mengapresiasi kegiatan revitalisasi bahasa kamoro yang digelar, dan membenarkan jika pemerintah daerah bertanggungjawab atas bahasa daerah. “Jadi, istilahnya bahasa menunjukkan bangsa, bahasa menunjukkan suku,” katanya.

Ia bahkan menyebut jika bahasa daerah atau ibu tidak dilestarikan maka akan hilang, terlebih dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini. “Dengan kegiatan seperti ini diharapkan balai bahasa dan pemerintah kabupaten untuk menginventarisir bahasa daerah yang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum,” ungkapnya.





Selanjutnya, Willem Naa, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika mengatakan, kemajuan teknologi menurutnya sudah menggeser kebudayaan diseluruh dunia termasuk Indonesia dan Papua. “Contoh anak-anak kita sudah tidak tahu bahasa, mereka hanya dengar, menyampaikan itu tidak bisa,” jelasnya.

Ia mengapresiasi kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang digelar oleh balai bahasa Provinsi Papua, dan mendukung apabila bahasa daerah bisa dimasukkan ke dalam kurikulum atau muatan lokal. “Kalau bisa Mimika yang pertama, dan kalau bisa Kamoro dan Amungme jalan sama-sama, lembaga ini juga bicara dengan DPRD untuk

berbicara manfaat revitalisasi ini, biar diberikan dukungan,” katanya.

Ia juga menegaskan akan mendukung dengan menugaskan guru Amungme dan Kamoro untuk mengajar soal bahasa daerah tersebut.

Sementara itu Assisten I setda Mimika Paulus Dumais yang hadir dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan dukungannya terhadap program revitalisasi yang dan pelatihan yang digelar.

“Saya mewakili bapak Plt Bupati mengapresiasi kepada balai bahasa yang telah peduli dan mau memberikan pelatihan kepada para guru utama demi menjaga bahasa daerah tetap ada,” tutupnya. **(BAPPEDA)**





# Mimika Dapat 100 Kuota Untuk Program Afirmasi Pendidikan Tinggi

**K**ABUPATEN Mimika kembali mendapat kuota untuk program afirmasi pendidikan tinggi (ADik). Program pemerintah pusat untuk menjaring calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal.





Plt Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Willem Naa pada Senin (22/5/2023) mengungkapkan sama seperti tahun sebelumnya, Mimika mendapat kuota program ADik. Jumlahnya pun tetap sama yaitu 100 calon mahasiswa.

Program ini dikatakan Willem Naa hanya diperuntukkan bagi anak asli Papua yang lulus dari sekolah menengah atas yang ada di Timika. Ketentuannya, me-

iliki garis keturunan Papua baik itu dari ayah maupun ibu. Sehingga dalam persyaratannya harus menyamakan kartu keluarga dan KTP.

Peserta yang lolos nantinya akan dikuliahkan di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta yang bekerjasama dengan program ini.

Seluruh biaya ditanggung mulai dari uang kuliah, uang saku Rp 1 juta per bulan hingga pemondokan.

Dalam program ini calon mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih jurusan dan perguruan tinggi. Namun harus disesuaikan dengan standar nilai dan syarat dari perguruan tinggi yang dituju. Willem Naa menyebut, tahun sebelumnya, program ini terbilang berhasil karena meluluskan anak-anak Papua termasuk ada yang meraih gelar dokter.

Proses seleksi baru dimulai oleh Dinas Pendidikan Mimika. Tim yang dibentuk bekerjasama dengan sekolah untuk menyiapkan data lulusan. Hal utama yang dipastikan adalah anak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena terkadang ada yang tidak sinkron. Sehingga tim meminta operator sekolah memastikan seluruh data murid terutama orang asli Papua terdaftar dalam Dapodik. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Disdukcapil Mimika Digitalisasi Layanan Adminduk

**P**EMERINTAH pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh daerah di Indonesia untuk memberikan percepatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) melalui proses digitalisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika secara bertahap telah menerapkan itu dalam pelayanan demi memberi kemudahan kepada masyarakat. Di Tahun ini, bertepatan dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, dimana data kependudukan sangat dibutuhkan

maka Disdukcapil Mimika akan melakukan berbagai terobosan agar masyarakat bisa memiliki dokumen kependudukan sebagai dasar memberikan hak pilih.

Untuk kepentingan tersebut, Disdukcapil menggelar rapat bersama para pemangku kepentingan diantaranya kepala kampung, kelurahan, kepala distrik, Badan Pusat Statistik (BPS), OPD terkait, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika di Hotel Horison Diana, Selasa (23/5/2023).

Penjabat Sekda Mimika, Dr Petrus Yumte, SH MSi mengatakan, kegiatan terse-

but bertujuan untuk menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil dari pusat hingga ke daerah, guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemilu 2024.

Serta sebagai upaya mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya, dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dapat menyamakan persepsi dan merumuskan langkah yang diperlukan untuk mendukung suksesnya



**FOTO BERSAMA** - Petrus Yumte, Pj Sekda Mimika saat foto bersama Slamet Sutejo, Kepala Dukcapil Mimika serta undangan lainnya di hotel Horison Diana, Selasa (23/5).

Foto: Bappeda



pelaksanaan pemilu 2024. "Kita bangun kebersamaan dan kekompakan bagi seluruh penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terus memberikan kemudahan dalam pelayanan dan mempercepat pelayanan dengan sistem digitalisasi," katanya.

Ia berharap, bisa menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi mendukung jajaran Dukcapil dari pusat hingga daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemilu 2024.

"Jadi masyarakat tidak lagi harus datang ke Kantor Dukcapil, karena bisa dapat pelayanan berbasis online untuk mewujudkan kinerja pelayanan kebersamaan, solidaritas dan kekompakan seluruh aparatur adminduk di daerah hingga kepusat harus terbangun dengan baik," jelasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pen-

catatan Sipil, Slamet Sutejo, SSTP MSI mengatakan, Disdukcapil terus berusaha meningkatkan pelayanan dengan cara digitalisasi sehingga data langsung terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Digitalisasi layanan juga akan memudahkan pihak terkait sebagai pengguna data salah satunya dalam rangka Pemilu. Dimana data kependudukan menjadi kunci kesuksesan Pemilu.

**6.070 Warga Mimika Sudah Gunakan KTP Digital**

Tidak hanya layanan, dokumen Adminduk sekarang ini juga sudah dialihkan ke aplikasi digital. Sepeteri e-KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya mulai dimigrasi menjadi KTP digital. Di Mimika setidaknya sudah ada 6.070 warga yang sudah menggunakan KTP digital. Pemerintah pusat sendiri menargetkan 25 juta penduduk Indonesia melakukan migrasi KTP digital di tahun ini.

Meski KTP sudah dimigrasi ke digital, namun bukan berarti e-KTP tidak berlaku lagi. Menyesuaikan dengan kondisi geografis dan demografi di Mimika maka masyarakat tetap dilayani untuk perekaman dan pencetakan e-KTP.

Disdukcapil Mimika menerapkan dua model sistem pelayanan yakni kepada masyarakat yang tinggal di pesisir dan pedalaman tetap dilayani dengan pembuatan e-KTP sementara di wilayah kota yang sudah terbiasa dengan teknologi digital akan diaktivitansi dengan KTP digital sehingga lambat laun bisa bermigrasi ke KTP digital.

Pemerintah pusat yang menargetkan setidaknya 5 sampai 10 tahun ke depan sebagian besar penduduk Indonesia sudah menggunakan KTP digital. Ini akan memberikan kemudahan, bisa diakses dimanapun, tidak perlu membawa fisik KTP dan tidak mudah rusak atau hilang. **(BAPPEDA)**





# 300.004 Jiwa di Mimika Sudah Terdaftar BPJS Kesehatan

**B**ADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat hingga Mei 2023, tercatat sebanyak 300.004 jiwa sudah terdaftar sebagai peserta. Angka ini menunjukkan 96 persen warga Mimika sudah tercover jaminan kesehatan nasional.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase, SKM, Selasa (23/5/2023) di Timika mengatakan pemerintah pusat menargetkan agar sebelum Tahun 2024, 95 persen warga harus terdaftar dalam JKN. Namun di Mimika, sudah melampaui target sebesar 96 persen. Bahkan pemkab Mimika menargetkan di Tahun 2024 bisa 98 persen bahkan 100 persen.

Dengan tingkat kepesertaan yang tinggi, BPJS Kesehatan telah membayar kapitasi ke 20 Puskesmas selama periode Januari-April 2023 sebesar Rp 4.471.671.865. Sementara klaim dari empat rumah



Pertemuan BPJS Kesehatan dengan Pemkab Mimika.

Foto: Bappeda

sakit di Mimika sebesar Rp 1.218.430.267.

Deny memastikan pembayaran klaim dari fasilitas kesehatan tidak pernah ditunda dan dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan berjalan. Untuk faskes tingkat pertama kapitasi dibayarkan berdasarkan jumlah peserta sedangkan rumah sakit berdasarkan klaim.

“Tentunya tidak dibayar begitu saja namun dilakukan verifikasi dan validasi lagi dimana pengajuan dilakukan paling lambat 15 hari setelah pengajuan pihaknya bisa membayar sesuai dengan tagihan yang diajukan. Salah satu permasalahan yang dihadapi salah satu rumah sakit di Mimika yang pengajuannya tidak tertib. Diharapkan rumah sakit paling lambat segera klaim pengajuan pembayaran tidak lambat,” jelas Deny. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda



# Disparbudpora Dukung Tim Futsal Mimika Berlaga di Linus Nasional

**S**EMPAT mengalami ketidakjelasan, Tim Futsal Kabupaten Mimika akhirnya bisa diberangkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mewakili Papua di babak 34 besar Liga Nusantara yang akan dilaksanakan di Gorontalo mulai 11 Juni 2023.

Tim futsal Mimika yang diperkuat 17

pemain akhirnya bisa berangkat setelah mendapat dukungan anggaran dari Pemkab Mimika melalui KONI dan Askab PSSI Mimika. Pelepasan tim dilaksanakan Senin (29/5/2023) di Bandara Mozes Kilangin oleh Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Mimika, Jacob Toisuta.

Jacob menyatakan ini merupakan bentuk komitmen dari Pemkab Mimika dalam mendukung kemajuan olahraga. Apalagi tim futsal merupakan juara Linus regional Papua sehingga secara otomatis menjadi wakil Papua di putaran nasional. "Yang paling penting adalah kekompakan tim baik di dalam lapangan maupun di luar







lapangan, kalau kompak di luar dan dalam, segala sesuatu yang kita inginkan pasti tercapai," ujar Yopi.

Ia mengakui, persiapan tim belum maksimal karena dipengaruhi keberangkatan yang sempat tidak ada kepastian. Tapi dengan adanya dukungan anggaran lewat kebijakan Plt Bupati Mimika maka ia berharap tim bisa tetap fokus untuk menjalani pertandingan. Begitu tiba di Gorontalo bisa melakukan latihan sebagai persiapan sehingga saat laga, para pemain bisa lebih fokus.

Plt Ketua Askab PSSI Mimika, Michael Renwarin menyebut tim futsal yang akan berangkat ini juga diharapkan tetap kompak dan bisa menjaga nama baik daerah serta menunjukkan prestasi yang membanggakan.

(BAPPEDA)



**Tim Futsal Mimika sebelum terbang ke Gorontalo untuk bertanding pada Liga Nusantara.**

Foto: Bappeda

# 182 Calon Jamaah Haji Asal Mimika Diberangkatkan ke Tanah Suci

**S**EBANYAK 182 calon jamaah haji asal Mimika siap diberangkatkan ke Arab Saudi melalui embar-kasi Makassar. Sebelum terbang ke Makassar, dilakukan pelepasan oleh Pemkab Mimika bersama Kantor Kementerian Agama Mimika pada Senin (15/5/2023) di Gedung Eme Neme Yauware.

Sebenarnya Mimika mendapat 201 kuota haji tahun ini. Namun hingga pelepasan, masih ada 19 orang yang belum melunasi biaya haji. Tetapi Kemenag masih memberi kesempatan untuk pelunasan hingga 19 Mei sebelum keberangkatan.

"Jamaah haji tahun ini kuotanya 201 jamaah. Hari ini pelepasan 182 jamaah. Masih ada 19 kuota jamaah yang kosong dan mereka pelunasan tahap tiga, tanggal 15-19 Mei. Diharapkan kuota penuh," jelas Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kement-



**Calon jamaah haji asal Mimika mengikuti acara pelepasan di Gedung Eme Neme Yauware Timika, Senin (15/5/2023).**

terian Agama, H Iwan Ikhsan, SH.

Kenaikan biaya haji disebut menjadi salah satu penyebab. Dimana total biaya haji sekarang mencapai Rp 58 juta dengan setoran awal Rp 25.503.000. Kendala lain karena faktor kesehatan, pindah domisili sehingga pemerintah kehilangan kontak yang bersangkutan

ataupun ada urusan keluarga.

Di antara 182 calon jamaah haji asal Mimika, ada yang sudah berusia 96 tahun dan termuda 32 tahun.

Calon jamaah haji dari Mimika tergabung dalam kloter 9 bersama rombongan dari Asmat sebanyak 43 orang, Nabire 141 orang, Keerom 12 orang



Foto: Bappeda



Calon jamaah haji asal Mimika mengikuti acara pelepasan di Gedung Eme Neme Yauware Timika, Senin (15/5/2023).

dan Biak Numfor 8 orang. Ditambah pendamping haji daerah ada satu orang KBIHU.

Untuk pemberangkatan gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Mei dan gelombang kedua tanggal 28 Mei. Kabupaten Mimika masuk kloter 9 dan selanjutnya akan masuk ke asrama haji pada tanggal 28 Mei. Serah terima dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Mimika ke asrama haji embarkasi Makassar

tanggal 28 Mei. Nantinya tanggal 30 Mei dini hari jamaah akan berangkat dari Makassar ke Madinah.

Kepala Kantor Kementerian Agama, Lukas Yasi, SAg berharap para calon jamaah haji dapat membawa nama baik daerah. Ia juga berharap semua calon jamaah haji yang berangkat dapat pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur.

Mewakili Plt Bupati, Asisten Bidang

Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Paulus Dumais berharap calon jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar dan kembali lagi ke Mimika dengan sehat. Pemerintah juga berharap agar jamaah calon haji dapat membawa nama baik daerah. "Kami harap tetap menjaga kesehatan, menunaikan ibadah dengan lancar dan kembali lagi dengan jumlah yang sama, menjadi haji yang mabrur," katanya. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Delapan Aksi Turunkan Stunting di Mimika

**P**EMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar pertemuan Koordinasi Terpadu Intervensi Penurunan Stunting Aksi I dan Aksi II di hotel Swiss Bellin, Selasa (30/5).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka Maria Rettob, Staf Ahli bidang Ekonomi Setda Mimika, dihadiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta undangan lainnya.

Regina Wenda, Kabid Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika selaku penanggungjawab kegiatan mengatakan, Intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi, yakni pertama analisis situasi program penurunan stunting, kemudian penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting, serta review kinerja tahunan.

Untuk aksi satu terkait analisis situasi program penurunan stunting merupakan proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini, untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK).

Proses ini sebagai dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi prioritas bagi rumah tang-

ga 1.000 HPK.

Ketersediaan program yang dimaksud adalah program-program pokok (kunci) untuk menyediakan intervensi gizi prioritas, seperti program kesehatan lainnya. Sementara aksi dua merupakan rencana tindak lanjut kabupaten dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi.

Tujuan analisis situasi dan penyusunan rencana kegiatan bertujuan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola kabupaten/kota bagi peningkatan cakupan layanan pada intervensi gizi prioritas. Selain itu, meningkatkan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK secara simultan

terhadap intervensi gizi prioritas, dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen data untuk menunjang keputusan alokasi program dan lokasi fokus.

“Output dari kegiatan ini yakni, rekomendasi kebutuhan program/kegiatan yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya, baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program, kemudian rekomendasi tindakan perbaikan penyampaian layanan yang perlu diprioritaskan untuk memastikan rumah tangga 1.000 HPK mengakses layanan serta rekomendasi kebutuhan kegiatan untuk penguatan koordinasi, baik koordinasi antar OPD dalam hal sinkronisasi program/kegiatan,” jelasnya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Setda Mi-





Foto: Bappeda

mika, Maria Rettob, mengatakan, perencanaan dan penganggaran Stunting harus berbasis data untuk meningkatkan kesesuaian pengalokasian program dan kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan intervensi.

Dikatakan, target nasional sampai tahun 2024 yakni menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Hal

tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri.

“ Jadi, sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah juga penting. Jangan lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab dinas kesehatan maupun dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana semata, “ jelasnya.

Ia menambahkan, keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan sangat penting, agar tidak ada kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan sebagai dasar perencanaan intervensi. Sebab dengan data yang akurat, dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.(BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Bappeda Mimika Gandeng Universitas Brawijaya Susun Naskah Teknokratik RPJMD

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika kembali menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sebagai langkah awal, Bappeda Mimika menggandeng akademisi dari Universitas Brawijaya untuk menyusun naskah teknokratik.

Dalam rangka penyusunan naskah teknokratik ini, dilakukan pertemuan yang dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (23/5/2023) di kantor Bappeda Mimika.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyo

mengatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Di daerah, proses perencanaan pembangunan menggunakan lima pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas.

Rancangan teknokratik RPJMD adalah dokumen perencanaan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dokumen ini harus diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah terpilih.

Naskah teknokratik RPJMD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan keuangan, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis da-





erah.

Tujuan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Mimika periode perencanaan pembangunan 2025-2029 adalah sebagai bahan untuk penyelarasan substansi arah kebijakan pem-

angunan daerah periode 2025-2029 dengan visi misi dan program dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Juga sebagai bahan untuk penyelarasan arah kebijakan keuangan daerah

periode 2025-2029 dengan visi, misi dan program dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Serta sebagai pedoman untuk penyusunan rancangan awal RPJMD periode perencanaan pembangunan 2025-2029. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda



# Bapenda Mimika Catat Penerimaan **Rp 2,8 Triliun**

**B**ADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika terus berupaya untuk mencapai target penerimaan daerah Tahun 2023 ini. Dari target Rp 5.130.288.950.400 yang ditetapkan dalam APBD 2023, sampai 22 Mei sudah terealisasi Rp 2.811.940.895.115 atau 54,81 persen.

Kepala Bapenda, Drs Dwi Cholifah menyebut, trend penerimaan pendapatan daerah pada Tahun 2023 ini cenderung positif. Sehingga pihaknya sangat optimis bisa mencapai target hingga akhir tahun anggaran.

Adapun sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.399.946.477.232 atau 72,13 persen dari target Rp 1.940.969.752.200. PAD ini meliputi, Pajak daerah yang ditarget Rp 257.345.600.000 dan sudah terealisasi Rp 44.222.841.068. Pajak





hotel ditarget Rp 13,8 miliar dengan realisasi Rp 4.563.413.064. Pajak restoran ditarget Rp 96 miliar dan sudah terealisasi Rp 23.988.117.644.

Kemudian pajak hiburan ditarget Rp 3.810.000.000 sudah terealisasi Rp 1.314.582.780. Sementara jenis pajak lain yakni pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan dan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) total realisasinya sudah mencapai 54,81 persen.

“Realisasi pendapatan secara keseluruhan sampai Mei ini sudah capai 54,81 persen, ini cukup baik dan kami optimis tahun ini bisa kembali capai target,” jelas Dwim

Untuk mencapai target pada akhir tahun anggaran, Bappeda akan melakukan berbagai cara untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satu program yang akan dilakukan kembali tahun ini tambahnya yakni kegiatan Bapenda Goes To Mall.

Dalam program ini kata dia, Bapenda akan membuka pelayanan pembayaran pajak di ruang publik seperti mall Diana Timika. Juga tetap dilakukan pelayanan jemput pajak dengan mobil keliling pajak. “Pelayanan semua pajak, supaya lebih dekat lagi, maka kami akan gelar Bapenda goes to mall. Mobil keliling kita juga jalan terus,” ungkapnya. **(BAPPEDA)**



Situasi Kota Timika.

Foto: Bappeda

# UMKM Diberi Kesempatan Ikut Pengadaan Barang dan Jasa



Foto: Bappeda

Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Pemkab Mimika.

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika mulai mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam instruksi tersebut, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dan merealisasikan 40 persen anggaran belanja barang/jasa untuk UMKM.





Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais dalam kegiatan sosialisasi penginputan SIPD P3DN, Rabu (10/5/2023) mengatakan kebijakan ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat mencintai dan menggunakan produk dalam negeri serta bertujuan untuk memberdayakan industry dalam negeri dan mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di lingkup Pemkab Mimika diungkapkan Paulus, bahwa anggaran belanja barang dan jasa Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 yang sudah

ada dalam Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP sebesar Rp 2,607 triliun. Namun sampai April 2023, realisasi belanja baru sebesar Rp 127 miliar atau 0,5 persen.

Meski masih rendah, namun Pemkab Mimika yakin target 75 persen yang diberikan oleh pemerintah dapat terlampaui. Sebab masih banyak paket pengadaan yang belum dilakukan proses produksi serta banyak yang belum dicatatkan pada sistem LPSE.

Pemkab kata dia terus memantau dan memastikan agar proses pengadaan juga berpihak pada penggunaan produk dalam negeri terutama melibatkan UMKM untuk bisa berperan ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# TPID Pantau Persediaan Beras

**T**IM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mimika telah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) KCP Timika dan sejumlah Distributor beras lainnya.

Sidak tersebut guna memonitoring adanya pasokan bahan pokok di Kabupaten Mimika salah satunya beras atau Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

"Kita jalankan tugas sebagaimana yang sudah tertuang dalam SK Bupati tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mimika. Jadi tim turun melakukan monitoring, dua hal yang pertama tentang ketersediaan sembako dan juga fluktuasi harga. Kita mengecek jangan sampai harga terlalu tinggi yang bisa menurunkan daya pembeli," kata Petrus Lewa Koten, Plt Asisten II Setda Mimika, Jumat (19/5).

Pada saat Sidak yang dilakukan bersama Tim Inflasi Daerah bahwa persediaan beras berkurang. Pasokan sekitar 2000 ton untuk memenuhi kebutuhan belum masuk ke Gudang Bulog. Ini disebabkan, pasokan dari daerah asal seperti Jawa dan Makassar sedang berkurang.

"Tadi memang ada kendala seperti di Kantor Bulog terdapat kekurangan beras, jadi mereka sekarang masih menunggu didatangkan dari Jawa dan Makassar, kita tanya lagi berkurang produksinya sehingga berimbas kepada kita, dari Merauke juga tidak bisa mengirim sesuai dengan permintaan karena mereka di sana juga keseringan banjir sehingga produksi juga menurun. Tadi saya tidak catat ya, tapi totalnya sekitar 2000an ton itu yang akan masuk di Bulog. Itu terakhir nan-

ti tanggal 29 Mei dia masuk Bulog. Dan itu yang kita monitor terus," ungkapnya.

Menurutnya, kalau memang ada kelangkaan yang sudah tidak bisa di Handle oleh Bulog ataupun pengusaha lain, maka pemerintah daerah harus intervensi dengan melakukan kerjasama antar daerah lain diluar Papua yang mempunyai stok beras banyak agar bisa dibeli dan dibuat dalam bentuk pasar murah.

Selain sidak ke Bulog, tim juga memantau persediaan beras di beberapa distributor. Tim menyatakan distributor kesulitan memenuhi permintaan karena di Merauke sedang gagal panen.

Setelah memastikan ketersediaan beras, tim akan rutin memantau ketersediaan dan harga bahan pokok untuk mengantisipasi terjadinya inflasi seperti gula dan minyak goreng. (BAPPEDA)



Ilustrasi beras bulog

Foto: Bappeda

# Implementasi Mimika Smart City

**K**ABUPATEN Mimika terpilih menjadi salah satu pilot project smart city di Indonesia pada Tahun 2016 lalu. Tujuh tahun berjalan, Pemkab Mimika telah melakukan berbagai program. Untuk menilai capaian tersebut, Pemkab Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas pada Kamis (04/05/2023) di Hotel Horison Ultima.

Agenda yang dibahas dalam FGD yakni penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penyusunan revisi dokumen masterplan smart city.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM menjelaskan bahwa kota Timika sudah tujuh tahun menjadi salah satu dari kabupaten/kota smart city. "Bila dibandingkan dengan daerah lain, Mimika memiliki fasilitas, ide-ide juga kreatif, tapi hanya sesaat, lalu tidak serius untuk menjalankannya dengan baik," ujarnya.

Beberapa implementasi smart city di Mimika adalah adanya Mimika Command Center, pemasangan CCTV atau kamera pemantau di beberapa ruas jalan serta aplikasi Lapor Meno. Hanya saja, dikatakan John Rettob, program ini belum optimal seperti CCTV persam-



pahan yang sebenarnya sudah ada tapi tidak ditindaklanjuti.

Plt Bupati Mimika menyatakan smart city bukan hanya aplikasi tapi juga terkait regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka menunjang smart city. "Smart city itu bukan hanya tentang aplikasi yang pintar, tapi bagaimana ada regulasi-regulasi yang pintar juga, yang pada akhirnya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Wikandanarso Nindio dari Institut Teknologi Bandung (ITB) selaku pembimbing program smart city di Kabupaten Mimika mengatakan, untuk mewujudkan smart city, Pemkab Mimika harus mengumpulkan semua dinas dan sumber daya yang ada, artinya tidak hanya pemerintah saja namun juga masyarakat agar mendukung program smart city ini.

Dalam mewujudkan kota smart city juga dibutuhkan anggaran. Maka, Pemkab Mimika harus fokus untuk menentukan apa yang seharusnya diprioritaskan untuk pengembangan pendidikan, fasilitas kesehatan sehingga layanan publik bisa menjadi nomor satu. Sementara layanan lain di bidang pemerintahan bisa menjadi prioritas berikutnya.

Pengembangan smart city di Mimika yang dilakukan selama tujuh tahun ini menurutnya, sudah ada perkembangan terutama dari sisi infrastruktur. Infrastruktur berupa layanan telekomunikasi yang tersebar sampai ke wilayah pelosok dan pedalaman. Namun untuk pengembangan dan pemanfaatan oleh masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda



# HARDIKNAS Kabupaten Mimika







*Mimika Membangun*